

## Implementasi Kepemimpinan Visioner Kepala Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi

**Muhammad Bima Alfaresi**

Universitas Adiwangsa Jambi

e-mail: muhammadbimaalfaresi@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner di desa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat peran utama, yaitu sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Kepala desa menunjukkan komitmen kuat dalam mengarahkan upaya pencapaian visi dan misi desa, membangun kolaborasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta menegakkan disiplin dan peningkatan mutu kerja. Selain itu, kepala desa berperan sebagai komunikator yang memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Lebih lanjut, peran sebagai pelatih diwujudkan melalui upaya menggerakkan partisipasi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi desa dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia demi kemajuan desa di masa mendatang.

**Kata kunci:** Kepemimpinan Visioner, Pelayanan Publik, Desa Mekar Jaya

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the visionary leadership practiced by the Head of Mekar Jaya Village, focusing on governance in Mekar Jaya Village, Muaro Jambi Regency. The findings indicate that visionary leadership in the village can be classified into four main roles: direction setter, change agent, spokesperson, and coach. The village head demonstrates strong commitment in directing efforts toward achieving the village's vision and mission, fostering collaboration with both internal and external stakeholders, and enforcing discipline alongside improving work quality. In addition, the village head serves as a communicator, providing understanding to village officials and the community regarding the necessary steps in governance and public service delivery. Furthermore, the coaching role is reflected in mobilizing community participation to realize the village's vision and optimize the utilization of available resources to support future village development.*

**Keywords:** *Visionary Leadership, Public Service, Mekar Jaya Village.*

### PENDAHULUAN

Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan konsep tentang kemampuan memengaruhi orang lain dalam menetapkan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai sasaran,

memengaruhi dinamika kelompok dan budaya, serta membentuk interpretasi pengikut terhadap berbagai peristiwa. Selain itu, kepemimpinan juga mencakup keterampilan dalam mengorganisasikan aktivitas guna

meraih target, menjaga hubungan kerja yang harmonis antaranggota kelompok, serta memperoleh dukungan dan kerja sama dari pihak luar, baik individu, kelompok, maupun organisasi.

Pemimpin dipandang sebagai faktor kunci dalam kemajuan suatu bangsa. Seorang pemimpin yang memiliki gagasan positif untuk pembangunan bangsa akan memberikan pengaruh yang signifikan melalui ucapan, gaya kepemimpinan, tindakan, maupun program yang dirancang. Pemimpin berfungsi sebagai teladan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, diperlukan sosok pemimpin yang dapat dipercaya, berintegritas, bebas dari praktik korupsi, selaras antara perkataan dan perbuatan, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan golongan, partai, atau keluarga, serta memiliki visi dan misi yang jelas mengenai masa depan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [1]. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan desa diarahkan untuk mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [2][3].

Sebagaimana dijelaskan oleh Veithzal Rivai (2006), kepemimpinan dan perilaku organisasi memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan [4]. Dalam konteks desa, pemerintah desa bertanggung

jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat [5]. Kepala desa, sebagai pemimpin, memiliki sejumlah kewenangan, antara lain memimpin jalannya pemerintahan desa berdasarkan kebijakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengajukan rancangan serta menetapkan peraturan desa, menyusun dan mengajukan rancangan APB Desa untuk dibahas bersama BPD, membina kehidupan masyarakat, mengembangkan perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan partisipatif, mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan, serta melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang kepala desa dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang memadai, baik dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, maupun mengawasi berbagai sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan kerja, metode, waktu, dana, serta komponen pendukung lainnya.

Pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan panduan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam buku *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* (2006), pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, pelayanan publik yang dapat diselenggarakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan pihak swasta, meskipun tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah. Contohnya adalah pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun transportasi.

Kedua, pelayanan publik yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, terutama dalam bentuk pelayanan yang bersifat regulatif seperti perizinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pelayanan publik dipandang sebagai representasi efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik telah menjadi isu strategis dalam kebijakan publik, karena mencerminkan kualitas kinerja organisasi pemerintahan.

Dalam perspektif teori organisasi, Herbert A. Simon menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu rancangan kerja sama, di mana setiap anggota memiliki peran yang diakui, disertai dengan kewajiban serta tugas tertentu yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama.

Sebagai unit pemerintahan paling rendah, desa dituntut untuk mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Aparatur desa juga diharapkan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak persoalan yang muncul dalam pelayanan publik, seperti lambannya aparatur dalam melayani warga, prosedur yang berbelit-belit, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta berbagai kendala lainnya. Peran strategis pemerintah desa sangat bergantung pada kemampuan aparturnya dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien, sebab selama ini aparatur sering dianggap bekerja secara

berbelit-belit, terjebak dalam praktik KKN, dan belum memiliki standar pelayanan yang jelas.

Pelayanan publik memiliki arti penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tenteram. Melalui pelayanan publik, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Akan tetapi, di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, masih kerap terjadi tumpang tindih dalam proses pelayanan, misalnya adanya saling lempar tanggung jawab antarperangkat desa. Muncul pula isu-isu yang kurang baik di masyarakat mengenai kebijakan maupun aturan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga masih rendah, baik dalam hal kehadiran di forum musyawarah, penyampaian ide dan gagasan, maupun dalam tahap evaluasi terhadap program pemerintah. Hal ini mengakibatkan pelayanan pembangunan kurang memuaskan, salah satunya karena pemerintah desa kurang maksimal dalam mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat.

Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain ego individu, kepentingan keluarga, lingkungan sekitar, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap kebutuhan masyarakat. Padahal, masyarakat pada umumnya mengharapkan pelayanan yang memuaskan, baik dalam sosialisasi, administrasi, maupun pembangunan. Jika pelayanan berjalan baik, akan tercipta hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga terwujud desa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Namun, hingga saat ini sistem pelayanan di Desa Mekar Jaya masih belum efektif, menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Sistem yang berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dari hasil observasi awal, terlihat pula kurangnya konsistensi aparatur dalam menjalankan jam kerja kantor desa. Sebagai pusat pelayanan warga, kantor desa seharusnya buka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat. Akan tetapi, praktiknya jadwal buka kantor tidak menentu, kadang hanya pada hari Senin dan Kamis, atau menyesuaikan kebutuhan, bahkan hanya saat ada kunjungan tertentu. Sementara itu, masyarakat membutuhkan pelayanan setiap hari.

Penulis juga menemukan adanya perangkapan pekerjaan (*double job*) di antara aparatur desa. Beberapa di antaranya masih menjadi guru honorer di sekolah, dan kondisi ini secara tidak langsung kerap mengganggu kelancaran pelayanan publik di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Jika situasi ini tidak segera ditangani atau dicarikan solusi, maka akan semakin memperburuk mutu pelayanan publik. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis bersama salah satu warga Desa Mekar Jaya, yang menyampaikan keluhannya:

“Saya ketika akan mengurus surat pengantar pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, dan sebagainya sangat kesulitan, bukan karena sulit persyaratannya, melainkan sulit menemui aparaturnya. Saya datang ke Kantor Desa, ternyata masih tutup. Lalu saya coba mendatangi rumah beliau juga tidak ada. Artinya, kami sebagai warga Desa bingung harus kemana untuk mengurus administrasi ini, apalagi tidak pernah ada pemberitahuan resmi dari pihak Desa mengenai jam operasional kantor.”

Keluhan senada juga disampaikan oleh warga lainnya, khususnya ketika mengurus

dokumen pertanahan. Ia menuturkan bahwa ada oknum aparat Desa yang meminta uang dengan dalih “uang tinta”:

“Pernah saya mengurus surat tanah. Setelah selesai dan akan pulang, aparat desa meminta uang tinta, katanya untuk membeli tinta printer di kantor desa. Saya tidak memberikannya, karena menurut saya kebutuhan tersebut sudah memiliki alokasi anggaran di kantor desa, bukan dibebankan kepada masyarakat.”

Berdasarkan beberapa temuan di atas, penulis menilai masih kurangnya peran *top leader* dalam hal ini Kepala Desa, yang seharusnya mampu melahirkan gagasan dan inovasi untuk memajukan pemerintahan desa, terutama dalam bidang pelayanan publik. Kepala Desa belum menunjukkan tanggung jawabnya secara optimal, karena masih banyak perangkat desa yang bekerja dengan tidak disiplin dan tidak tepat waktu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemimpin memiliki peranan besar dalam kemajuan sebuah organisasi, khususnya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Kajian empiris di negara-negara Asia menunjukkan bahwa salah satu kunci perubahan terletak pada kepemimpinan pemerintahan. Goleman menyatakan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menciptakan *resonansi*, yakni suasana positif yang dapat menumbuhkan komitmen seluruh sumber daya manusia di dalam organisasi, sehingga mereka dapat memberikan hasil terbaik bagi organisasi. Lebih lanjut, Schein menegaskan bahwa seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dari permasalahan yang ditemukan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Mekar Jaya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari kualitas pelayanan publik yang belum berjalan baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Kepemimpinan Visioner Kepala Desa dan Pelayanan Publik di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi.”**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Proses pengambilan data dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2025. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, yaitu menyusun gambaran penelitian melalui tiga tahap: reduksi data (penyederhanaan informasi), penyajian atau visualisasi data, serta penarikan kesimpulan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para responden. Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Mekar Jaya, aparatur desa, serta warga masyarakat Desa Mekar Jaya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, skripsi, serta berbagai sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendukung hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **KEPEMIMPINAN VISIONER KEPALA DESA DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA MEKAR JAYA KABUPATEN MUARO JAMBI**

#### **A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Mekar Jaya Tahun 2025–2031 merupakan pedoman pembangunan desa untuk enam tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, mengelola pembangunan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, RPJM juga berperan sebagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kebutuhan masyarakat, memberikan pedoman langkah strategis desa dalam jangka menengah, serta memastikan pemanfaatan sumber daya dan anggaran desa secara efektif dan efisien. RPJM Desa Mekar Jaya disusun untuk mewujudkan visi dan misi desa, menjaga kesinambungan pembangunan, dan memperkuat pengembangan desa secara berkelanjutan.

##### **a. Visi dan Misi Desa**

Visi Desa Mekar Jaya

“Mewujudkan Desa Mekar Jaya yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan

potensi desa secara berkelanjutan dengan berlandaskan iman dan taqwa.”<sup>2)</sup> Misi Desa

a) Mengoptimalkan pengelolaan seluruh aset Pendapatan Asli Desa (PAD) sehingga dapat memperkuat keuangan desa yang mandiri dan berdaya saing.

b) Menyelenggarakan tata kelola sumber pendapatan desa secara transparan dan akuntabel, sehingga ke depan masyarakat Desa Mekar Jaya tidak lagi terbebani dengan berbagai pungutan atau iuran tambahan.

c) Berkomitmen penuh untuk merealisasikan visi dan misi desa dalam kurun waktu tiga tahun pertama, dengan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan amanah secara terbuka kepada pemerintah daerah jika tidak ada capaian signifikan.

d) Menjalankan amanah sebagai pemimpin desa dengan kesungguhan jiwa dan raga, serta memohon ridha Allah SWT agar setiap langkah yang ditempuh mendapat keberkahan.

e) Memaksimalkan peran dan fungsi Kepala Dusun serta Ketua RT dalam membangun sinergi pelayanan publik yang efektif di tingkat paling bawah.

f) Membangun sistem keamanan dan kenyamanan yang kondusif agar masyarakat Desa Mekar Jaya dapat hidup dengan tenteram dan harmonis.

g) Menyelenggarakan pemerintahan desa serta pelayanan publik secara santun, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

h) Memperkuat kerja sama antara pemerintah desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 1. Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan desa sesuai dengan visi dan misi Desa Mekar Jaya, diperlukan arah kebijakan pembangunan yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan Desa Mekar Jaya difokuskan pada terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, religius, serta berkeadilan, yang ditopang oleh ketersediaan sarana dan prasarana memadai serta aparatur pemerintahan yang profesional.

Kebijakan pembangunan Desa Mekar Jaya mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan “kail” daripada “ikan”, bahkan lebih jauh lagi mengajarkan “cara membuat kail”, sehingga masyarakat memiliki kemandirian dalam meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, fokus kebijakan pembangunan Desa Mekar Jaya enam tahun ke depan diarahkan pada tiga bidang utama, yaitu:

#### 1. Bidang Pembangunan Wilayah

Mencakup pengembangan infrastruktur umum, sarana pendidikan, fasilitas pemerintahan, sarana keagamaan, pengembangan olahraga, pengelolaan sumber daya air, serta penyediaan fasilitas penerangan.

#### 2. Bidang Sosial Budaya

Meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan potensi pariwisata lokal, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan.

#### 3. Bidang Ekonomi

Difokuskan pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi, industri kecil menengah, serta pemanfaatan sumber daya kehutanan. Seluruhnya diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Mekar Jaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan keuangan Desa Mekar Jaya merupakan pedoman dalam penyusunan program serta penetapan kegiatan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja desa agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Secara umum, arah kebijakan keuangan desa mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. **Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

a. **Sumber-sumber pendapatan desa** meliputi:

- **Pendapatan Asli Desa (PAD)**, yang terdiri atas hasil usaha desa, pemanfaatan kekayaan desa, kontribusi dari swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, serta berbagai bentuk pendapatan sah lainnya yang berasal dari potensi desa.
- **Bagi hasil pajak daerah** dari Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan minimal 10% (sepuluh per seratus) dialokasikan untuk desa. Selain itu, sebagian dari penerimaan retribusi Kabupaten juga diperuntukkan bagi desa.
- **Dana perimbangan keuangan daerah**, yaitu

bagian dari dana yang diterima Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dialokasikan secara proporsional kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

- **Dana Desa**, dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Besaran penerimaan disesuaikan dengan bobot variabel luas wilayah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta kesulitan geografis desa.
- **Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat**, baik berupa dana maupun sumber daya lain, sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi diarahkan pada peningkatan efektivitas serta optimalisasi seluruh sumber penerimaan desa. Hal ini ditempuh melalui:

1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber penerimaan desa maupun sumber penerimaan sah lainnya.
2. Peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara penuh dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan sekaligus pemanfaatan aset-aset desa

- yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
4. Perbaiki manajemen dalam tata kelola keuangan desa.
  5. Peningkatan mutu pelayanan terhadap wajib pajak maupun objek pajak desa.
  6. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan mengenai perpajakan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
  7. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan desa.
  8. Penyusunan maupun revisi regulasi yang berkaitan dengan pendapatan desa.

#### Arah Kebijakan Belanja Desa

Dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi Desa Mekar Jaya serta program prioritas untuk periode tahun 2023–2029, arah kebijakan anggaran pembangunan desa ditetapkan sebagai berikut:

1. Mendorong efisiensi penggunaan anggaran, terutama pada pos belanja tidak langsung.
2. Memperbesar porsi anggaran pada belanja langsung dan bantuan sosial, sebagai strategi mempercepat pengentasan kemiskinan.
3. Menggali berbagai peluang pendanaan dari beragam sumber, baik berupa bantuan dari pemerintah maupun kontribusi langsung masyarakat yang dapat digulirkan untuk pembangunan desa.

## 2. Potensi dan Masalah

### Pembangunan Perdesaan

Pembangunan desa pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara potensi yang dimiliki masyarakat desa dengan dukungan

eksternal yang mendorong percepatan pembangunan. Pendekatan ini menghasilkan suatu proses perubahan yang berjalan secara berkesinambungan. Dengan landasan tersebut, pembangunan di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan pada tingkat nasional maupun global. Setiap perubahan yang terjadi secara nasional maupun global akan memberi dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat desa, baik dalam bidang ekonomi, hubungan sosial, budaya, maupun pola pengambilan keputusan.

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua pelaku ekonomi dapat terlibat dalam pembangunan, serta tidak setiap warga desa memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan dari proses pembangunan. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan pembangunan cenderung tersisih, sehingga mengalami pengangguran dan kemiskinan. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian memunculkan kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor ekonomi, maupun antar wilayah. Oleh karena itu, salah satu solusi penting dalam mengatasi persoalan di Desa Mekar Jaya adalah memanfaatkan berbagai potensi lokal yang tersedia.

### Identifikasi Permasalahan dan Potensi Desa

Untuk mengenali persoalan dan potensi desa, dilakukan pengkajian kondisi desa melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

#### a. Peta Sosial Desa / Sketsa Desa

Sketsa desa adalah gambaran menyeluruh mengenai kondisi sumber daya yang ada di Desa Mekar Jaya, baik sumber daya alam, infrastruktur, tenaga kerja,

maupun sumber daya keuangan. Tujuannya adalah:

- Mengetahui jenis, jumlah, dan sebaran sumber daya desa.
- Menjadi instrumen untuk mengidentifikasi masalah di tingkat dusun, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (pengembangan wilayah, sosial budaya, dan ekonomi).
- Menjadi sarana untuk menggali potensi desa pada level dusun.
- Menyamakan persepsi masyarakat terkait masalah dan potensi yang ada.

#### **b. Kalender Musim**

Kalender musim merupakan instrumen analisis untuk memetakan kegiatan masyarakat berdasarkan perubahan waktu. Tujuannya adalah:

- Mengidentifikasi aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan siklus waktu.
- Mengetahui kejadian berulang terkait pemenuhan kebutuhan dan hak dasar masyarakat.
- Menentukan periode kritis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

#### **c. Bagan Kelembagaan**

Bagan kelembagaan memberikan gambaran mengenai organisasi dan lembaga yang ada di Desa Mekar Jaya serta pola hubungannya dengan masyarakat. Tujuannya adalah:

- Mengidentifikasi jenis dan jumlah lembaga yang berperan di desa.
- Mengetahui lembaga-lembaga yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Memahami pola hubungan antar lembaga dengan masyarakat.

- Menggali masalah dan potensi yang terkait dengan kelembagaan desa.

#### **Program Pembangunan Desa**

Untuk menerjemahkan arah kebijakan pembangunan Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, diperlukan perencanaan program pembangunan yang jelas. Program tersebut menjadi acuan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan, sekaligus sebagai dasar penetapan indikasi program sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kepemimpinan Visioner Kepala Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dapat disimpulkan bahwa penerapan kepemimpinan visioner di desa ini masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Kepemimpinan visioner tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

##### **1. Kepemimpinan Visioner sebagai Penentu Arah**

Kepala Desa Mekar Jaya berupaya menjalankan fungsi kepemimpinan visioner dalam menetapkan arah pembangunan desa, antara lain dengan:

1. Memiliki orientasi jangka panjang terhadap masa depan desa serta berkomitmen mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Menjalin kerja sama baik dengan lingkungan internal maupun eksternal desa, serta mengomunikasikan visi dan misi tersebut kepada masyarakat pada momen-

momen tertentu agar dapat dipahami bersama.

## 2. Kepemimpinan Visioner sebagai Agen Perubahan

Sebagai agen perubahan, Kepala Desa Mekar Jaya melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyelenggarakan rapat internal secara rutin sebagai upaya menegakkan disiplin dalam organisasi pemerintahan desa.
2. Mendorong seluruh aparatur desa untuk memperhatikan kualitas hasil kerja, terutama terkait kerapian, ketelitian, dan kesesuaian dengan harapan serta kebutuhan masyarakat.

## 3. Kepemimpinan Visioner sebagai Juru Bicara

Dalam perannya sebagai juru bicara, Kepala Desa Mekar Jaya menekankan pada:

1. Menjamin bahwa setiap aparat desa bekerja dengan kualitas yang baik, ditunjukkan melalui ketelitian dan kerapian dalam pelaksanaan tugas.
2. Memberikan arahan yang jelas kepada aparat desa terkait langkah-langkah yang harus diambil maupun dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pelayanan administrasi, agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## 4. Kepemimpinan Visioner sebagai Pelatih

Sebagai pelatih, Kepala Desa Mekar Jaya menjalankan kepemimpinannya dengan cara:

1. Menggerakkan seluruh komponen desa agar

bersinergi mewujudkan visi bersama melalui kepatuhan terhadap aturan, kebijakan, dan tata kelola yang berlaku.

2. Menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya desa, baik di sektor pertanian maupun sosial kemasyarakatan, sebagai penopang utama untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat desa di masa depan.

## SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat dikatakan sepenuhnya sempurna. Namun demikian, hasil penelitian ini tetap diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat. Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa saran agar penelitian ini dapat memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak, yaitu:

1. **Untuk Kepala Desa**  
Diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan kepemimpinan visioner sehingga visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan lebih baik.
2. **Untuk Pemerintah Desa**  
Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat Desa Mekar Jaya, sehingga pencapaian tujuan pembangunan desa dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien.
3. **Untuk Peneliti Selanjutnya**  
Diharapkan mampu mengembangkan penelitian terkait kepemimpinan visioner

maupun pelayanan publik lainnya, serta memperluas sumber referensi dan literatur guna memperkaya hasil penelitian di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: LN No.7/2014, TLN No. 5495.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: LN No.112/2009.
- Kementerian PANRB. (2014). Permen PANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Kementerian PANRB. (2017). Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bennis, W., & Nanus, B. (1985). *Leaders: The strategies for taking charge*. New York: Harper & Row.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2017). *The Leadership Challenge* (6th ed.). Hoboken, NJ: Jossey-Bass/Wiley.
- Moenir, H. A. S. (2010). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nanus, B. (1992). *Visionary Leadership: Creating a compelling sense of direction for your organization*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sashkin, M., & Sashkin, M. G. (2003). *Leadership That Matters*. San Francisco: Berrett-Koehler.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing customer perceptions and expectations*. New York: Free Press.